

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Kesejahteraan sosial merupakan gambaran dari sebuah negara yang ideal. Di Indonesia sendiri untuk mencapai kesejahteraan sosial telah diatur dalam pembukaan UUD 1945, sebagai acuan dalam mengambil berbagai keputusan. Pada pembukaan UUD 1945 terdapat ukuran sejahtera seperti, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kesejahteraan sosial bukan hanya dibahas pada pembukaan UUD 1945 saja, konsep kesejahteraan juga terdapat pada pasal 33 dan 34 dibagian XIV UUD 1945 meliputi kesehatan, ekonomi, dan jaminan sosial. Konsep kesejahteraan yang terdapat pada UUD 1945 selaras dengan yang dikemukakan oleh Midgley dalam buku yang berjudul *social Deveelopment : The Developmental Perspective in Social Welfare* menerangkan kesejahteraan sosial seperti;

“Suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat di kelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat di maksimalkan.”

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti halnya kebijakan pembangunan, merupakan sebuah cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan pembangunan sebuah kunci dalam perwujudan kesejahteraan rakyat dimana pemerintah melakukan dengan cara membangun secara fisik (bangunan) dan juga secara *non-fisik* (sosial) (Communication & Ekonomi, n.d.). Rencana pembangunan jangka panjang dimulai pada masa Orde Baru, pemerintahan Orde Baru secara resmi berjalan pada tahun 1968. Pembangunan masa Orde Baru dimulai dengan kebijakan pembangunan jangka

panjang 25 tahun (1968-1993) pembangunan berfokus pada pemerataan, pertumbuhan dan stabilisasi yang dinamis (Mustopadidjaja, 2012). Tahap perencanaan 25 tahun berikutnya (1994-2019), akan tetapi pemerintahan Orde Baru berakhir ditahun 1998 dengan paket kebijakan REPELITA VI (Rencana Pembangunan Lima Tahun VI).

Indonesia pada masa kepemimpinan presiden Suharto mengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan yang diamanahkan oleh UUD 1945. Program besar yang terkenal pada masa pemerintah Orde Baru ialah Rencana Pembangunan Lima Tahun yang selanjutnya akan ditulis REPLITA, tujuan dari program ini secara pasti untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Banyak aspek yang terdapat pada REPELITA seperti halnya pangan, kesehatan, dan ekonomi. Sifat dari kebijakan REPELITA sendiri pada awalnya bersifat rehabilitasi dan pengembangan. Pada awalnya pemerintah mengambil kebijakan seperti ini untuk membiasakan rakyatnya dengan sebuah kebijakan baru yang di buat (Sosial, Pusat Data dan Informasi RI, 1999).

Penerapan kebijakan REPELITA sendiri berpegang pada konsep “Trilogi Pembangunan”(Hadi & Kusuma, 2006). Trilogi pembangunan dijalankan dengan cara pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi (Mayrudin, 2018). Dengan “Trilogi pembangunan” Suharto berhasil untuk membawa Indonesia menjadi “Macan Asia”, tahun 1980 - 1993 Indonesia di bawah pimpinan Suharto mampu mempertahankan laju Inflasi di bawah 8% (Boediono, 2016).

Ekonomi Indonesia pada periode itu sedang terjadi kestabilan yang dinamis, pendapatan masyarakat pada tahun 1980 mencapai Rp 207.700 pertahun (Van

Zanden & Mark, 2012). Pemerintah dalam hal ini mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, alasan pemerintahan melakukan peningkatan ini dengan maksud Menjalankan UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru hadir dengan kebijakan kesejahteraan yang berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat (The World Bank Office Jakarta, 1966).

Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan sudah memiliki legalitas hukum yaitu undang – undang No 6 tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial. Keluarnya undang–undang tersebut untuk mendorong kesejahteraan yang diinginkan oleh pemerintah (Biro Hukum Departemen Sosial, 1980). Hal itu untuk tercapainya pembangunan Nasional yang maksimal dan selaras antara pemerintah daerah dan pusat. Keselarasan pemerintahan pusat dan daerah ditemui dalam pembangunan kesejahteraan di Jakarta. Khusus daerah Jakarta pada periode Orde Baru banyak memiliki permasalahan sosial yang harus cepat diselesaikan. Permasalahan yang dihadapi seperti ketimpangan sosial, kependudukan, dan ekonomi (Edi, 1986).

Pada tahun 1971, Jakarta memiliki penduduk 4.579.303 (Badan Pusat Statistik, 2021) dan luas wilayah 587,62 km<sup>2</sup>. Kawasan Jakarta sendiri meliputi seperti;

Jakarta Pusat (Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih Menteng, dan Tanah Abang), Jakarta Utara (Pulau Seribu, Penjaringan, Tanjung Priok, dan Koja) Jakarta Barat (Cengkareng, Grogol Petamburan, Tambora, Taman Sari, dan Kebon Jeruk), Jakarta Selatan (Tebet, Setia Budi, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru) dan Jakarta Timur ( Matraman, Pulo Gadung, Jatinegara, Kramat Jati, dan Pasar Rebo.).

Kondisi administratif Jakarta pada pemerintahan Orde Baru banyak mengadopsi pemikiran Sukarno yang menginginkan Jakarta setara dengan negara Asia Tenggara lainnya (Blackburn, n.d.). Pemerintahan DKI Jakarta membuat sebuah rancangan pembangunan jangka panjang selama 20 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jakarta. Rancangan jangka panjang menginginkan kota Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi Jakarta yang sedang mengalami pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan kondisi ekonomi yang sedang menurun, sehingga Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 1970 Jakarta menghadapi arus urbanisasi. Terjadinya situasi ini disebabkan Jakarta merupakan kota yang memberikan harapan bagi para pendatang. Hadirnya penduduk dari luar Jakarta yang nantinya membentuk sebuah pemukiman berdasarkan daerah asal, seperti kampung Bali, kampung Melayu, dan kampung Makassar diambil berdasarkan etnis mayoritas yang mendiami tempat tersebut. (Candiwidoro, 2017). Respon Pemprov DKI dengan hadirnya kaum urban yang melonjak pesat mengeluarkan kebijakan “kota tertutup”, hal ini dilakukan pemerintah untuk menekan laju urbanisasi yang terjadi di DKI (Rustiadi et al., 1999). Hal ini membuat penduduk di Jakarta dapat terkendali dan juga membuat pemerataan penduduk dengan dibangunnya kota-kota penunjang seperti halnya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Masyarakat Jakarta di dominasi oleh masyarakat pendatang, hal ini terjadi karena Jakarta sebagai Ibukota Negara. Sebagai Ibukota Negara, Jakarta memiliki daya tarik tersendiri yang membuat banyak masyarakat tertarik datang untuk memperbaiki kehidupannya. Pada tahun 1977 banyak masyarakat yang pindah dari

daerahnya ke Jakarta berjumlah 23.332 Jiwa, didominasi oleh masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur (Badan Pusat Statistik Jakarta, 1978). Kehidupan Jakarta belum memiliki potensi merubah kehidupan menjadi lebih baik, karena kehidupan di Jakarta membutuhkan tingkat pendidikan dan kemampuan individu.

Pemprov DKI, mewujudkan kesejahteraan melalui proyek Muhammad Husni Thamrin (1969) yang berorientasi pada revitalisasi pemukiman. Saat perencanaanya Pemprov DKI mendapat penolakan dari BAPPENAS di karenakan tidak menguntungkan dari segi ekonomi (Karta Hadimadja, 1993). Pemprov ingin menjalankan kebijakan ini, karena kawasan Jakarta mendesak untuk diperbaiki. Pemprov DKI membawa persoalan ini ke DPRD untuk di setujui. Akhirnya DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menyetujui dan mendapatkan alokasi dana dari Pelita I.

Peningkatan kesejahteraan rakyat selalu ditingkatkan. Pemprov DKI pada tahun 1981 melakukan sebuah kebijakan yang berbeda, efektifitas penggunaan lahan yang menjadi fokus. Efektifitas penggunaan lahan disini di gambarkan seperti penggusuran tanah, nantinya warga yang tergusur mendapatkan uang ganti rugi (Jillinek, 1995). Pemprov juga memberikan rumah susun yang ada di berbagai daerah yang ada di Jakarta, hal ini bertujuan untuk memperindah kawasan Jakarta.

Memperindah kawasan Jakarta bukan hanya sebatas memindahkan sebuah kawasan esensial, melainkan mengatur pertumbuhan penduduk. Selain membangun rumah susun untuk memperindah kawasan Jakarta, Pemprov DKI juga membangun beberapa fasilitas publik. Pembangunan yang dilakukan Pemprov, untuk menjaga

stabilitas ekonomi dan kepadatan pendudukan merupakan hal penting (Murtopo, 1981).

Stabilitas ekonomi diwujudkan oleh Pemprov dengan di bukanya lapangan kerja di Perkampungan Industri Kecil (PIK) di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Keberhasilan pembukaan lapangan kerja, dilanjutkan dengan reklamasi kawasan pantai utara Jakarta. Reklamasi yang di lakukan oleh Pemprov bertujuan dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan kota dan perluasan daerah kawasan, sehingga dapat ditempati oleh seluruh warga Jakarta (Ruang Direktorat Jenderal Penataan, 2003). Orientasi pembangunan ekonomi yang di lakukan oleh Pemprov DKI ialah industrialisasi.

Pemprov DKI dalam membangun kota Jakarta tidak melupakan aspek jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan hal yang wajib dilakukan setiap pemerintahan, karena jaminan sosial merupakan aspek terpenting dalam membantu warganya. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan sebuah wadah yang di berikan oleh Pemprov untuk masyarakat umum dalam bidang kesehatan (Adisasmito, 2008). Program jaminan sosial yang di jalankan Pemprov sendiri dapat membantu rakyat dalam bidang kesehatan dan ekonomi.

Dalam permasalahan pendidikan di Jakarta masih banyak masyarakat Jakarta yang mengalami buta huruf dan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Kondisi penduduk DKI Jakarta pada awal masa Ali Sadikin memiliki taraf pendidikan belum tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, dan tidak sekolah, pada tahun 1971 kondisi pendidikan yang masih banyak masyarakat Jakarta menyangang buta huruf sebanyak 1.618.512. Maka dapat disimpulkan bahwa masih

rendahnya tingkat pendidikan dan partisipasi penduduk DKI Jakarta untuk melanjutkan pendidikan ke setiap jenjang yang lebih tinggi.

Untuk jaminan sosial pada tahun 1966 hingga 1997 masih menjadi masalah, bentuk jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan bantuan langsung tunai. Pemprov dalam hal ini memberikan dalam bentuk ketersediaan fasilitas. Kondisi masyarakat Jakarta yang masih dalam membangun tatanan kehidupan seharusnya mendapatkan hal tersebut, tetapi Pemprov. Dengan banyaknya aspek sejahtera yang belum terpenuhi, pemprov DKI dengan anggaran yang terbatas juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah agar kesejahteraan tercapai. Melakukan pembangunan sebuah cara Pemprov untuk memberikan pelayanan kepada penduduk Jakarta dan dampak pada bidang kesejahteraan sosial.

Melihat kondisi Jakarta dengan teori yang di gambarkan Spicker, Jakarta dalam hal sejahtera sendiri belum masuk dalam kriteria. Permasalahan kampung kumuh, membuat banyak aspek ikut didalamnya seperti, kesehatan yang terganggu. Perekonomian yang belum stabil sehingga masyarakat terpaksa hidup dengan kondisi yang seadanya. Kondisi lainnya masih banyak penduduk Jakarta yang mengalami buta huruf, serta dalam belum jaminan sosial kepada masyarakat. Serta lowongan pekerjaan masyarakat yang belum terbuka.

Penulisan tentang Jakarta sendiri sudah pernah diangkat oleh berbagai penulis sebelumnya seperti, Paramita Widyaningrum pernah menulis mengenai “Peranan Ali Sadikin Dalam pembangunan Kota Jakarta Tahun 1966-1977”, yang menjelaskan tentang peranan Ali Sadikin membangun kawasan Jakarta dengan permasalahan yang kompleks. Penulisan tentang Jakarta lainnya di lakukan oleh Imam Hilman dengan judul “Program Perbaikan Kampung : Proyek Muhammad

Husni Thamrin Di Jakarta Tahun 1969-1979”, yang menggambarkan bagaimana kondisi perkampungan Jakarta pada masa Orde Baru. Penelitian Jakarta lainnya seperti yang di gambarkan oleh Ratu Husmiati dengan judul “Ali Sadikin dan pembangunan Jakarta 1966-1977”, pada tesis ini mengungkapkan tindakan Gubernur Ali Sadikin dalam mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan Jakarta untuk membangun Jakarta menjadi kota yang representatif Indonesia.

Penulisan ini menggunakan pendekatan kesejarahan dengan mengkaitkan berbagai kebijakan yang di buat Pemprov DKI dalam bidang kesejahteraan. Keunggulan penulisan ini memberikan gambaran kesejahteraan yang dicapai DKI secara lengkap, dari masa jabatan Ali Sadikin hingga masa Surjadi Soedirdja. Setiap Gubernur yang menjabat tentunya memiliki kebijakan yang berorientasi pada kebermanfaatannya untuk warganya, kesejahteraan untuk warganya menjadi prioritas setiap Gubernur yang menjabat.

#### **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Penulisan ini pada dasarnya memberikan gambaran bagaimana fenomena sosial ekonomi pada periode Orde Baru, dengan mengangkat judul “Kesejahteraan Masyarakat Jakarta Masa Orde Baru”. Batas spasial penulisan ini ialah DKI Jakarta, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Sedangkan batas temporal penulisan ini dilakukan mulai masa jabatan Ali Sadikin tahun 1966 hingga jabatan Surjadi Soedirdja tahun 1997.

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penulisan ini, adalah:

1. Mengapa pemerintah DKI Jakarta membuat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta?



2. Bagaimana kebijakan pemerintahan DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana perkembangan kesejahteraan masyarakat Jakarta sejak Ali Sadikin hingga Surjadi Soedirdja?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui perkembangan kesejahteraan pemerintah DKI Jakarta pada masa jabatan Ali Sadikin hingga jabatan Surjadi Soedirdja. Kegunaan penulisan ini secara akademis dapat dijadikan bahan rujukan bagi kalangan mahasiswa atau penulis yang ingin meneliti tentang kondisi sosial Jakarta. Untuk dunia pendidikan sendiri untuk mempertajam gambaran kesejahteraan rakyat Jakarta dimasa Orde Baru.

### **D. Kerangka Analisis**

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya. Tentunya peran negara dalam menerapkan sistem kesejahteraan yang menitik beratkan pada kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Hal ini selaras dengan konsep Midgley menjelaskan kesejahteraan dalam *social Deveelopment : The Developmental Perspective in Scoial Welfare* untuk sebuah negara dikatakan sejahtera bila ;

“.....suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial di kendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa akeesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku individu-individu, keluarga-keluarga, komunitaskomunitas dan bahkan seluruh masyarakat”

Pandangan kesejahteraan menurut Friedlander (1980) dalam buku pengantar kesejahteraan sosial karya Adi Fahrudin yang menggambarkan

kesejahteraan dengan; Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan–pelayanan sosial dan institusi-institusi yang di rancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat (Fahrudin, 2018).

Padangan ahli tentang kondisi kesejahteraan sebuah wilayah untuk dapat memenuhi beberapa indikator. Purwanto (2007) memiliki indikator kesejahteraan masyarakat terpenuhi seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan rasa aman. Kanah (2015) menggambarkan kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan, papapan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lingkungan yang bersih, nyaman dan aman.

Badan Pusat Statitsik memiliki indikator tentang kesejahteraan yang mencakup tentang kondisi penduduk, kesehatan, pendidikan angkatan kerja, kelahiran, dan perumahan.

#### **E. Metode & Sumber Penulisan**

Metode penulisan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dipergunakan untuk penulisan, dengan itu penulis menggunakan kaidah keilmuan secara ilmiah. Metode sejarah merupakan teknik penulisan yang merupakan proses pengujian dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data otentik dan dapat dipercaya, hal ini didasarkan oleh pemikiran Louis Gottchalk (Sulasman, 2014). Metode memiliki ciri – ciri yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional

sendiri memiliki makna, penulisan yang dilakukan harus masuk akal dan mudah dipahami dengan nalar. Empiris sendiri memiliki arti, bahwa hal ini didasari penemuan yang sudah di temukan oleh penulis.

Penulisan sejarah ini menggunakan model deskriptif-analisis. Pada hakikatnya model deskriptif-analisis untuk menjawab bagaimana dan mengapa pada suatu fenomena yang diajukan oleh penulis. Penulisan dengan model deskriptif-analisis dituntut untuk menguasai bidang ilmu yang akan ditelitinya sehingga dapat memberikan pandangan mengenai konsep dan makna yang terkandung pada data yang didapat (Asyrof, 2013).

Dalam hal ini penulis berpedoman pada pemikiran Kuntowijoyo, yang berpendapat bahwa pencarian topik tahap pertama dalam penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2013). Hal ini dimaksudkan agar pokok pembahasannya dapat fokus dan menarik untuk dibahas. Metode penulisan yang diutarakan oleh Kuntowijoyo yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

#### **a. Topik**

Pemilihan topik dilakukan untuk mencari hal yang baru dalam khasanah pengetahuan sejarah nasional Indonesia. Dalam pemilihan topik, dipilih untuk menarik pembaca dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan (Kuntowijoyo, 2013). Topik yang diangkat oleh penulis yaitu tentang kesejahteraan sosial, banyak hal yang bisa diulas dalam penulisan ini seperti halnya peningkatan kesejahteraan Jakarta dan program Pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan. Topik yang sudah diperoleh dapat dirumuskan dalam judul yang menarik, judul “Kesejahteraan Masyarakat Jakarta 1969-1997” yang dimana

sudah terdapat batas batas temporal maupun spasialnya. Dalam pemilihan topik penulis memiliki kedekatan intelektual yang dimana saat perkuliahan sejarah sosial-ekonomi yang pernah menulis tentang kesejahteraan warga grogol-petamburan. Kedekatan emosional penulis terhadap topik karena dengan mempelajari konsep kesejahteraan dapat mengukur seberapa sejahtera hidup penulis tentunya. Penulis dalam merumuskan topik yang menarik untuk ditulis dengan cara membaca berbagai sumber yang ada di internet serta buku yang tersedia di perpustakaan nasional.

#### **b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Setelah penulis mendapatkan topik yang menarik, penulis mencari sumber yang relevan. Sumber -sumber yang digunakan memiliki beberapa kategori seperti sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer memiliki makna sebuah sumber yang datanya akurat seperti halnya lembaran negara dan statistik periode sezaman. Sumber primer yang digunakan oleh penulis seperti data Badan Pusat Statistik Jakarta dari tahun 1966-1997. Penulis melakukan kegiatan ini dengan cara mengakses <https://jakarta.bps.go.id/> untuk memperoleh data statistik, walaupun demikian dokumen yang diperoleh sumber asli yang di digitalkan.

Sedangkan sumber sekunder memiliki pengertian data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis lain, bentuk sumber sekunder yang penulis miliki seperti buku, jurnal dan artikel yang diakses di internet dan perpustakaan nasional. Sumber yang digunakan seperti hal rekam jejak gubernur Ali sadikin - Surjadi Soedirdja dalam buku Refleksi pers kepala daerah Jakarta 1945-2012, dan jurnal kesejahteraan. Dalam pencarian sumber yang relevan akan

topik yang dikaji oleh penulis, penulis mencarinya di *internet*, Perpustakaan Nasional, dan pada bibliografi sebuah penelitian. Dengan kegiatan ini penulis dapat memperoleh sumber yang relevan, sehingga penulisan yang berkaitan dengan topik penulis dapat memperkuat sumber primer yang sudah diperoleh.

### **c. Kritik Sumber Sejarah (Verifikasi)**

Setelah mengumpulkan sumber yang relevan, kemudian penulis melakukan kritik sumber, hal ini bertujuan untuk mendapatkan fakta sejarah yang mendukung argumentasi dari penulis. Kritik yang dilakukan untuk menentukan kelayakan sumber yang digunakan penulis sehingga membuat fakta yang hadir dalam tulisan dapat dipertanggung jawabkan. Kritik ekstern sebuah cara terhadap keabsahan sebuah sumber. Hal ini dapat berupa dilakukannya dengan memperhatikan tanggal, waktu dan siapa pengarangnya, serta menguji seberapa kredibilitas isi dari sumber hal hal yang membahas tentang sejarah Jakarta dan kebijakan yang diberlakukan setiap Gubernur.

Penulis dalam hal ini menggunakan kritik *intern* yang dimana mengkritisi isi dari sumber yang telah ditemukan apakah sudah relevan dengan apa yang dibutuhkan. Penulis berusaha memahami apa saja yang sudah dilakukan pada setiap periode Gubernur dalam mencapai kesejahteraan, dengan data-data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang dikorelasikan dengan sumber sumber pendukung lainnya.

### **d. Interpretasi**

Interpretasi merupakan penjelasan dari sumber yang dibaca oleh penulis kemudian dikumpulkan menjadi kesatuan yang runtut. Interpretasi sendiri

merupakan hasil subjektifitas dalam seleksi bahan yang akan digunakan dalam penulisan (Kuntowijoyo, 2008). Kuntowijoyo juga menegaskan kembali dari fakta sejarah yang ada, sejarawan juga harus objektif dalam menilai sebuah peristiwa. Interpretasi yang peneliti buat adalah untuk membandingkan fakta sejarah yang ditemukan peneliti sumber terkait seperti arsip dan peneliti memilah dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber tersebut kemudian menjadi tahapan historiografi.

Data statistik yang diperoleh penulis dari BPS Jakarta, penulis melihat bagaimana signifikansi peningkatan kesejahteraan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI.

#### **e. Penulisan Sejarah (Historiografi)**

Tahapan akhir yaitu historiografi, merupakan cara penulis untuk menyatukan informasi yang memuat fakta. Penulis menyusun fakta-fakta yang ditemukan dari sumber primer dan sekunder yang kemudian dituliskan dengan membentuk paragraf yang padu dengan teknik penulisan deskriptif–analisis, yang dimana memiliki makna sebuah penulisan yang dirangkai dengan sebab akibat dari sebuah peristiwa. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran tentang kondisi sosial-ekonomi Jakarta pada periode 1966-1997. Sehingga diharapkan penulisan ini dapat mengerti bagaimana sebuah fenomena tertentu dapat terjadi pada masa lalu yang digambarkan oleh penulis.

Penulis dalam tahap ini menuliskan hasil penelitian setelah melalui seluruh rangkaian penelitian sejarah. Dengan judul “Kesejahteraan Masyarakat Jakarta 1969-1997”.